BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara adalah untuk mensejahterakan rakyat, demikian halnya dengan negara Indonesia. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal. Peningkatan kesejahteraan dapat dilihat dari semakin banyaknya kebutuhan yang dapat dipenuhi. Berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, dalam setiap masyarakat tersedia sumber dan potensi yang dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itu, pembangunan masyarakat menciptakan hubungan yang serasi antara sumber-sumber yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat.[1]

Sebagai proses di dalam pembangunan, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pembangunan dan pemberdayaan adalah hal yang sangat lumrah dibicarakan untuk kemajuan dan perubahan bangsa saat ini, apalagi jika dilihat dari kemampuan masyarakat Indonesia belum cukup baik sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Memberdayakan masyarakat berupaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang ini belum mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dengan kata lain pemberdayaan masyarakat memampukan dan memandirikan masyarakat, hingga muncul

[1] Dian Puja Rismaya, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Mitra Usaha” Dalam Meningkatkan Sektor Usaha Anggota KUB MULYASARI Desa Lohgandu, Karanggayam, Kebumen”, (*Skripsi* Sarjana “Universitas Negeri Yogyakarta”,2018).

perubahan yang lebih efektif dan efisien. Keterbelakangan sosial terjadi pada masyarakat desa dikarenakan sulitnya masyarakat desa menerima budaya modernisasi, sulit menerima teknologi baru, tidak mempunyai motivasi yang kuat, dan merasa cukup puas dengan pemenuhan kebutuhan pokok yang paling dasar.[2]

Salah satu upaya pemerintah desa dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan sulitnya masyarakat menerima budaya modernisasi yaitu dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial *(social institution)* dan komersial *(commercial institution)*. Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.[3]

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa serta PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam UU No. 32 tahun 2004 juncto. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi: Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No.6 tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 87 ayat (1) yang

---

[2] Syafrida, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang", (*Skripsi* Sarjana "Universitas Sumatera Utara Medan", Sumatera Utara 2018).

[3] Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, hlm. 3.

berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes, “dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[4]

Kemudian dengan adanya landasan hukum tersebut, maka desa dapat membentuk badan usaha milik desa yang disebut BUMDes. BUMDes adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro desa yang dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah desa dan pengelolaannya terpisah dari kegiatan desa. BUMDes selanjutnya dibentuk dengan mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dibidang ekonomi. Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi daan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa, kerjasama antar desa atau bekerja sama dengan perusahaan sekitar. Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.[5]

Desa Teluk Terate merupakan salah satu desa di Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang yang mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan menggantungkan nasibnya dari hasil panen, namun kini sudah banyak lahan pertanian yang diratakan sehingga mengharuskan masyarakat Desa Teluk Terate untuk mencari mata pencaharian baru . Untuk itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sabar Subur hadir di tengah-tengah masyarakat desa

---

[4] Garnies Lellyana Sagita, “ Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Klaten” (Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Klaten 2017).

[5] Robert Chambers, 1988, *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Peneragan ekonomi dan Sosial), hlm. 216.

Teluk Terate sebagai lembaga upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa Teluk Terate. Sebagai salah satu desa di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. Masyarakat desa Teluk Terate menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Namun, yang memprihatinkan hasil pertanian yang dilakukan petani di desanya masih sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sabar Subur yang merupakan binaan dari Perusahaan Gas Negara (PGN) yang diturunkan pada Juli 2015 akhirnya yang pada saat itu belum berjalannya program apapun karena belum adanya dana yang tersalurkan untuk menjalankan program, pada saat itu banyak warga yang kehilangan mata pencahariannya sebagai petani. Hingga akhirnya pada awal tahun 2017 mereka mendapat tawaran untuk bekerjasama dengan salah satu perusahaan besar yaitu Perusahaan Gas Nasional (PGN) dan tawaran untuk kerjasama itu di setujui oleh pihak perusahaan. PGN kemudian mendampingi BUMDes Sabar Subur dalam mengelola dana yang sudah masuk karena bantuan dari PGN ini. Setelah hampir satu tahun berjalan, sekarang BUMDes Sabar Subur telah menjalankan sejumlah programnya di antaranya adalah unit Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), unit jasa penyewaan, unit pelatihan dan ketenagakerjaan. Disamping itu, juga ada kegiatan sosial lainnya yang digerakkan oleh BUMDES Sabar Subur seperti penghijauan dan kesehatan untuk ibu hamil dan balita yang sampai sekarang masih terus aktif dan berjalan.

Salah satu unit yang berpengaruh adalah LKMS yang diberi nama Baitul Bai'i. LKMS ini menggunakan sistem syari'ah atau sistem bagi hasil. Nasabah diberi pembiayaan untuk usaha, di antaranya adalah untuk usaha warung kelontong, usaha keripik singkong, usaha bawang goreng, peternakan ikan lele, dan lainnya.[6]

Penelitian ini menarik dan belum pernah dilakukan serta memiliki unsur kebaruan. Karena belum pernah dilakukan pada peneliti sebelumnya mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik

[6] Wawancara dengan Muhiyi, tanggal 18 Desember 2019 di Kantor BUMDes Sabar Subur.

Desa (BUMDes) Sabar Subur. Dalam program ini semua kalangan bisa mengikutinya terlebih untuk kepala keluarga yang benar-benar berniat mengubah kehidupan keluarganya.

Alasan penulis melakukan penelitian ini karena penulis merasa tertantang untuk membahas dan meneliti bagaimana pemberdayaan yang dilakukan BUMDes Sabar Subur untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saya tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui (BUMDES) Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada BUMDes Sabar Subur di Desa Teluk Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kondisi sosial masyarakat Desa Teluk Terate ?
2. Bagaimana pemberdayaan BUMDes Sabar Subur untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat ?
3. Bagaimana hasil dari pemberdayaan BUMDes Sabar Subur terhadap kesejahteraan masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasikan kondisi sosial masyarakat Desa Teluk Terate.
2. Untuk mengidentifikasikan bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDES.
3. Untuk mengidentifikasikan bagaimana hasil dari pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDES.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai pemberdayaan BUMDES Sabar Subur untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa Teluk Terate, Kramatwatu, Serang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada:

a. Bagi Peneliti

Agar penulis dapat memberikan pengalaman berpikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan skripsi, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dalam hal pengembangan masyarakat Islam.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta referensi penelitian selanjutnya dan memberikan masukan kepada BUMDes Sabar Subur selaku lembaga upaya pengingkatan ekonomi masyarakat desa Teluk Terate kecamatan Kramatwatu kabupaten Serang.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian atau kajian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau bahan rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah bagi setiap akademis, baik di kalangan UIN SMH Banten maupun pihak-pihak lain.

E. Tinjauan Pustaka

Sesuai dengan permasalahan yang di bahas, penulis juga melihat dan menelaah beberapa literatur dan penelitian yang mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan penulis yang terdahulu. Diantara peneliti-peneliti yang ada kaitannya dengan penulis yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Aqmarina Ramadhani[7] dengan judul Keberadaan Badan Usaha Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan yaitu pengumpulan data dan metode analisis, tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Ponggok. Hasil yang dicapai dari kegiatan program ini yaitu pemberdayaan masyarakat ialah sangat penting dalam pengembangan Desa Wisata Ponggok. Masyarakat Desa Ponggok sudah sangat berperan aktif sebagai pelaku maupun sebagai inisiator. Kerjasama dari pemerinta dan masyarakat ini sangat diperlukan. Pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan Desa Wisata Ponggok sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Almasri dan Dewi Deswimar[8]dengan judul Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan penelitian ini bertujuan untuk terkonsen pada menggali dampak keberadaan Badan Usaha Milik Desa pada kesejahteraan masyarakat penelitian ini menggunakan satu metode yaitu metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan dibidang sosial. Keberadaan BUMDes membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Rufaidah Aslamiah[9]dengan judul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo melalui Kelompok Usaha Pengelola

---

[7] Aqmarina Ramadhani, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah*, (*skripsi* Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2017).

[8] Almasri, Dewi Deswimar, Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan "*skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau"

[9] Rufaidah Islamiah, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggunghargjo Melalui Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (KUPAS) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta"(*Skripsi* Sarjana UIN "Sunan Kalijaga", Yogyakarta 2017).

Sampah (KUPAS) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran BUMDes dalam mensejahterakan masyarakat melalui KUPAS, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitan ini yaitu bahwa BUMDes Panggung Lestari berperan sebagai lembaga pelayanan berbasis masyarakat, Pemerintah BUMDes memiliki tiga peran, antara lain : Penyebaran Informasi dan Mendorong pembuatan jaringan, (2) Berperan penting dan vital dalam memungkinkan, dan berperan minimal dalam pemberian, (3) Realokasi sumber daya, karena adanya berbagai tingkat sumber daya yang tersedia bagi masyarakat untuk pembangunan.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Syafrida dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tangjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat desa di desa Dalu X A, Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 3 pendekatan utama tujuan utama upaya itu harus terarah, dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran, dan melalui pendekatan kelompok. Hasil dari penelitian ini yaitu pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes sudah berjalan secara efektif dilihat dari penjualan beras yang dikelola oleh masyarakat Desa, dan mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan seharai-hari dengan adanya sistem menyicil dan harga relatif lebih murah dari harga toko lain.

Dari tinjauan pustaka diatas sudah jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Studi Pada BUMDES Sabar Subur. BUMDES memberdayakan ekonomi masyarakat melalui program yang sudah terbagi menjadi beberapa unit yakni unit pelatihan dan ketenagakerjaan, unit LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah), unit jasa penyewaan dan unit bank sampah namun penulis hanya berfokus pada satu unit yaitu unit LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) yang meminjamkan modal untuk para

pengusaha kecil agar usaha yang sedang dijalankan bisa lebih berkembang. Bukan hanya pengusaha kecil para petani juga dipinjamkan modal awal untuk kebunnya, dan uang pinjaman tersebut bisa dibayar sesuai dengan kesepakatan di awal bisa juga dibayar setelah panen.

F. Kerangka Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Definisi pemberdayaan

Gagasan pemberdayaan adalah sentral bagi suatu strategi keadilan sosial dan HAM, walaupun pemberdayaan adalah kata yang telah digunakan secara berlebihan dan sedang berada dalam bahaya kehilangan arti substantifnya. Ia merupakan pusat dari gagasan-gagasan kerja masyarakat, dan banyak pekerja masyarakat akan memilih mendefinisikan peranan mereka dalam pengertian suatu proses pemberdayaan.[10]

Pemberdayaan adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable*. Lebih jauh Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal. Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi alternative dan pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya.[11]

Pengertian pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga

---

[10] Ife Jim, *community development*,(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), hal 130s cet ke-3
[11] Munawar Noor,"Pemberdayaan Masyarakat", jurnal *ilmiah*, Vol.1, No 2, (Juli 2011).

mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri. Secara lebih rinci pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu di sini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif. Pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat individu dan masyarakat.[12]

Pemberdayaan merupakan upaya membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan. Pemberdayaan terhadap ekonomi kerakyatan harus dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan dunia perbankan. Terdapat lima misi utama dalam pemberdayaan, yaitu (1) penyadaran, (2) pengorganisasian, (3) kederisasi pendamping, (4) dukungan teknis, dan (5) pengelolaan sistem. Sementara itu, upaya pemberdayaan harus dilakukan melalui tiga cara seperti berikut ini: (a) menciptakan iklim yang kondusif masyarakat akan berkembang, (b) memperkuat potensi masyarakat dengan menyiapkan sarana prasarana baik fisik maupun sosial yang mampu diakses oleh lapisan masyarakat paling bawah, dan (c) memberdayakan dalam arti melindungi dan melindungi dan membela masyarakat lemah.

Pemberdayaan diberikan kepada pelaku ekonomi lemah untuk meningkatkan kemampuan bisnis (kewirausahaan). Esensi dari pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah memberdayakan UMKM, koperasi, dan kelompok masyarakat agar mandiri di bidang ekonomi,

---

[12] Oos M. Anwar , *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, (Bandung: ALFABETA, 2014), cetakan pertama, hlm. 48-50.

sehingga mampu membangun kegiatan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.

b. Fungsi dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suntoyo Usman fungsi dan tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi. Kebutuhan dasar itu mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/internasional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut unsur struktural (kebijakan) dan kultural.[13]

c. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Jim Ife, pemberdayaan masyarakat memiliki 22 prinsip. Antara satu prinsip dengan prinsip yang lain saling berkaitan dan saling melengkapi. Prinsip-prinsip suatu kegiatan diasumsikan menjadi pertimbangan bagi sukses tidaknya suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dianggap konsisten dengan semangat keadilan sosial dan sudut pandang ekologis.[14]

d. Bentuk-bentuk Pemberdayaan Masyarakat

1. *The Walfare Approach*

   The Walfare Approach merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu.

2. *The Development Approach*

---

[13] Cholisin, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : UNY, 2011), h.2.

[14] Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: KENCANA, 2013), cetakan pertama, h.41.

The Development Approach merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dengan memusatkan kegiatannya pada pengembangan proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan keswadayaan masyarakat.

3. *The Empowerment Approach*

   The Empowerment Approach merupakan pemberdayaan masyarakat dengan melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan.[15]

e. **Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat**

Konsep pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah nampaknya belum mampu menjawab tuntutan masyarakat yang menyangkut keadilan, pemerataan dan keberpihakan kepada masyarakat, sehingga belum mengangkat sebagian penduduk yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat nampaknya tidak akan lepas dari pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan yang berdimensi rakyat. Berangkat dari kondisi itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan pemerintah:

1. Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang dalam GBHN Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam GBHN tahun 1999, khususnya didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah” antara lain dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI”

[15] Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, ..., h.120.

2. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain ditegakan bahwa "hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran serta masyarakat.
3. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasioanal (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.[16]

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

A. Definisi Badan Usaha Milik Desa

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDES dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help.* Hal ini penting mengingat bahwa profesionalime pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi (sebagai

[16] Munawar Noor, "Pengembangan Masyarakat", Jurnal *Ilmiah* CIVIS, Vol.1, No.2, (Juli 2011), h.89-90.

produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara professional dan mandiri.[17]

Maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah sebuah badan usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan dipercayai oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur dan termanajemen. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka BUMDES harus memiliki peran yang selaras dengan tujuan tersebut. Peran BUMDES secara umum adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa.

Badan usaha milik desa merupakan badan usaha yang di kelola secara mandiri oleh desa, dengan bantuan perangkat desa dan masyarakat. Tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa diharapkan desa dapat mengelola perekonomian secara mandiri. Desa Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu sudah berdiri Badan Usaha Milik Desa sejak tahun 2014. BUMDes memiliki peran mengatur perekonomian yang ada di desa terutama bidang usaha bisnis penyewaan alat, unit pelatihan dan ketenagakerjaan, lembaga keuangan mikro syariah.

Namun di Desa Teluk Terate masih mengalami beberapa kendala di dalam pemberdayaan BUMDes, di antaranya masih kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan BUMDes. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa hal ini tercantum dalam Undang-Undang No.12/2008. Sehingga BUMDes di bangun sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang bertujuan untuk memberdayaan

[17] Coristya, Heru, Suwondo "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa", Jurnal *Administrasi Publik* Vol 1 No. 6, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

masyarakat desa. Masyarakat ikut berperan dalam perencanaan, dan pelaksanaan BUMDes.[18]

Agar keberadaan lembaga pengembangan ekonomi ini tidak dikuasai pihak tertentu (pemilik modal besar), maka kepemilikan lembaga ini harus dikelola oleh desa dan dikontrol bersama-sama sehingga tujuan lembaga dalam pemberdayaan masyarakat dapat terwujudkan.

a. Tujuan BUMDes

Tujuan dari pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan desa dalam rangka pembangunan desa, mengembangkan potensi perekonomian di pedesaan, memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa, meningkatkan pengelolaan aset desa yang ada.[19]

b. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Keberadaan BUMDes sebelum diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan segala aturan pelaksanaannya, terlebih dahulu diatur dalam Pasal 213 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Rumusan Pasal 213 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut adalah “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa”. Rumusan yang sama diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan pelaksana yang lebih jelas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang badan usaha milik desa. Sebelum akhirnya diatur dalam

---

[18] Wawancara dengan Muhiyi, tanggal 18 Desember 2019 di Kantor BUMDes Sabar Subur.

[19] Rizka Hayyuna, dkk, “ Strategi Managemen Aset BUMDes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (studi pada BUMDes di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik)”, Jurnal *Administrasi Publik*, Vol.2, No.1 (2010) Universitas Brawijaya Malang, h.3.

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.[20]

Saat ini masih banyak BUMDes yang belum bisa beroperasi dengan maksimal lantaran minimnya inovasi. Pada bidang pemberdayaan desa, saat ini di Kabupaten Serang telah ada 90 BUMDes yang telah berdiri. Dari jumlah tersebut sebanyak 35 BUMDes telah berjalan secara optimal, sisanya belum dapat berjalan dengan baik. Hal ini membuat DPMD Kabupaten Serang bertekad untuk mengoptimalkan potensi dari BUMDes yang ada. Jika 90 BUMDes yang ada di Kabupaten Serang beroperasi dengan bai, maka perekonomian rakyat meningkat dan PADes juga ikut meningkat.

Tidak hanya memfasilitasi pembentukan BUMDes saja, DPMD juga melakukan pendampingan sampai BUMDesa bisa berkembang dan mandiri. Beberapa BUMDes sudah mulai berkembang seperti BUMDes Sukatani Kecamatan Cikande, BUMDes Sukaratu Kecamatan Cikeusal, BUMDes Pejaten, BUMDes Tengkurak Kecamatan Tirtayasa, BUMDes Sabar Subur Kecamatan Kramatwatu, BUMDes Kaduberem, dan BUMDes Padarincang Kecamatan Padarincang. Terkait dengan program inovasi desa. DPMD juga telah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan program yang bisa di danai oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Tujuan dari inovasi desa itu sendiri untuk meningkatkan kualitas penggunaan dana desa (DD).

3. Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

a. Definisi Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan

[20] Agus Adhari Ismaidar, "Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat", Jurnal *Hukum Bisnis Dan Invetasi*, Vol. 9 No. 1 (November 2017), Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Panca Bumi.

kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan ini diwujudkan agar warga negara tersebut dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik, jika masyarakat sejahtera berarti masyarakat tersebut mengalami kemakmuran.[21]

Kesejahteraan selalu dikaitkan dengan materi, dimana semakin tinggi produktivitas maka pendapatan yang dihasilkan pun akan semakin tinggi. Ukuran tingkat kesejahteraan lainnya juga dapat dilihat dari non materi seperti yang dikatakan oleh Pratama dan Mandala. melalui tingkat pendidikan, kesehatan dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan yang lebih baik. Pandangan masyarakat umum, dalam keluarga yang sejahtera maka mampu menyekolahkan anggota keluarganya hingga setinggi mungkin. Sama halnya jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan membawa keluarganya semakin sejahtera karena mendapatkan timbal balik seperti pekerjaan yang mapan dan pendapatan yang mencukupi.

b. Ekonomi

Globalisasi ekonomi yang dipengaruhi oleh ekonomi neoklasik dan kekuatan kapitalis transnasional telah membawa dampak pada banyak orang. Banyak yang merasakan bahwa ekonomi pada saat ini tidak lagi memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini terbukti pada angka pengangguran yang cukup tinggi dalam banyak masyarakat.[22]

Ekonomi atau *economic* dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata Oikos atau Oiku dan Nomor yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami,isteri

---

[21] Astriana Widyastuti, "Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah", *Economics Development Analysis Journal,* Vol. 1 No. 1 (2012), Universitas Negeri Semarang, h.2.

[22] Ife Jim, *community development*,(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), hal 422 cet ke-3

dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.[23]

Adapun ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya. Tujuan dari perekonomian adalah untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan tercipta kesejahteraan kelangsungan hidup yang produktif.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoretis. Dalam suatu penelitian metode mempunyai peran penting dalam pengumpulan dan analisis data. Pada penelitian ini saya menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.[24] Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang.

2. Teknik Pengumpulan Data

---

[23] Iskandar Putong, *Economics Pengantar Mikro Dan Makro*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010), h.1.

[24] Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Grasindo, 2010), h.5.

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah:

a. Observasi

Menurut Supardi observasi merupakan metode pengumpulam data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam penelitian ini saya menggunakan observasi partisipatif pasif yang artinya saya datang ke tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.[25] Hanya mengamati dan melakukan pencatatan di Desa Teluk Terate.

- Kelebihan Observasi

  Dapat merekam hal-hal, perilaku pertumbuhan, dan sehingga pada saat kejadian berlangsung atau saat perilaku terjadi. Dapat memperoleh data langsung dari subjek, yang keduanya dapat berkomunikasi secara verbal atau tidak.

- Kelemahan Observasi

  Dibutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil dari suatu peristiwa, seperti upacara pemakaman Toraja dalam kasus kematian, para peneliti akan harus menunggu untuk upacara adat. Pengamatan fenomena yang berlangsung lama, tidak bisa dilakukan secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg adalah merupakan pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.teknk wawancara yang dilakukan adalah wawancara semistruktur *(in-depth Interview).* Wawancara semistruktur merupakan wawancara yang pelaksananya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : Alfabeta, 2015), cetakan ketujuh, h.310.

terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.[26]

Adapun yang menjadi responden yaitu sesepuh, dua orang pengurus BUMDes Sabar Subur, dua orang petani, dua orang pengusaha kecil dan tiga warga biasa. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan dengan membawa pedoman wawancara yang ditulis secara garis besar. Wawancara dilakukan secara bergiliran kepada setiap responden. Peneliti melakukan wawancara dengan merekam isi pembicaraan dari setiap responden kemudian mencatat hal-hal penting yang telah disampaikan oleh responden yang berhubungan dengan objek penelitian, dan hasil dari wawancara tersebut kemudian dianalisis peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.[27] Dalam penelitian ini data yang diperoleh foto-foto keadaan lingkungan serta beberapa foto petani yang sedang bertani.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan lawan kata sekunder, yang berarti utama, asli, atau langsung dari sumbernya. Data primer merupakan data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab masalah risetnya secara khusus. Data tersebut tidak tersedia dari periset perlu melakukan pengumpulan atau pengadaan data sendiri.[28]

---

[26] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,... h.316.

[27] Albi aggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2018), cetakan pertama, h.255.

[28] Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), cetakan kedua, h.38.

Penelitian yang saya lakukan mengambil data secara langsung dari pihak-pihak yang berhubungan dengan tempat penelitian ini, melalui observasi serta pengamatan langsung, wawancara dengan responden yang telah ditentukan.

b. Data Sekunder

Data primer merupakan data yang bukan secara langsung dari sumbernya atau data yang telah dikumpulkan pihak lain artinya peneliti hanya sekedar mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut yang telah dikumpulkan.[29] Data penelitian tersebut berupa dokumen-dokumen yang sudah ada terkait kondisi dan letak geografis tempat yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan pembahasan. Adapun sistematika yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka teori, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

BAB II Berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan BUMDes Sabar Subur. Bab ini dibagi menjadi sub bab yakni Gambaran UmumDesa Teluk Terate, kondisi pendidikan masyarakat Desa Teluk Terate, kondisi sosial masyarakat Desa Teluk Terate dan kondisi ekonomi Desa Teluk Terate, profil BUMDes Sabar Subur, program-program BUMDes Sabar Subur , Fasilitas Sarana Prasarana BUMDes Sabar Subur, Sumber Pendanaan BUMDes Sabar Subur.

BAB III menjelaskan tentang proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes Sabar Subur. Bab ini dibagi dalam beberapa sub bab yakni, cara pengolahan singkong menjadi keripik dan pemasarannya.

---

[29] Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia,...*, h.33.

BAB IV menjelaskan tentang hasil lapangan dan analisis pemberdayaan ekonomi masyarakat melalu BUMDes Sabar Subur study pada BUMDes Sabar Subur Desa Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang yang akan dianalisis dan diuraikan sebagai hasil dari penelitian. Bab ini dibagi dalam beberapa sub bab yakni Tahap Pemberdayaan, dan faat Pemberdayaan masyarakat dan Faktor Pendukung serta penghambatnya.

BAB V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari rumusan masalah dan saran.